



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR
Jalan Panglima Ngumbang No. 01 Lanjak, Kode Pos 78766

283

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: SETDA Kab. K.H	Diterima Tgl.	: Rabu 11 Oktober 2023
No. Surat	: 900.1.13.1/3058/BPDD/PPD	No. Agenda	: 283
Tgl. Surat	: 09 Oktober 2023	Sifat	: Penting
Hal	: Pemberitahuan Pajak Restoran (Catering)		
Diteruskan kepada Saudara :		Dengan hormat harap :	
1. Pak Oron		1. Tanggapan dan Saran	
2.		2. Proses lebih lanjut	
3.		3. Koordinasi / Konfirmasikan	
Catatan : Tolong berikan pemberitahuan pajak Restoran (Catering)			
- untuk Pagarin Tambakornon			
- untuk Pagarin Pengiri pjab			
Camat / Sekcam Paraf & Tgl. 11/10-23			



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567) 21003 Fax. (0567) 21397

Putussibau, 09 Oktober 2023

Nomor : 900.1.13.1/3098/BPDD/PPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Pajak Restoran
(Catering)

Kepada
Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Kapuas Hulu (Daftar Terlampir)
di-
Tempat.

Dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kapuas Hulu dari sektor Pajak Daerah terutama Pajak Restoran (catering) yang sumber pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) belanja makan dan minum (catering) tahun anggaran 2023 yang melekat pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas Hulu, untuk itu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran makan dan minum (catering) termasuk dalam klasifikasi Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah pada pasal 10.
2. Bahwa berdasarkan point 1 diatas yang mana pagu anggaran belanja makan dan minum OPD sampai dengan 1.500.000 akan dikenakan pajak restoran (catering) sebesar 10% kurang dari 1.500.000 tidak dikenakan pajak restoran (catering).
3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas, bagi OPD yang sudah melaksanakan pencairan anggaran kegiatan yang berkaitan dengan belanja makan dan minum (catering) untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan point 1,2 dan 3 diatas terlampir disampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Restoran (catering).
- 5. Apabila ada OPD yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut terkait Kewajiban Pajak restoran (catering) dapat langsung ke kantor Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu atau menghubungi Kabid Penagihan dan Pengendalian Bapenda Kabupaten Kapuas Hulu (HP. 0823-5776-0686).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI KAPUAS HULU
SEKRETARIS DAERAH,

Des. H. MOHD ZAINI, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19650910 199303 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Danau Luar No. 02 Putussibau
78711
(0567) 21184 e-Mail
Putussibau

URAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
(SPTPD)
PAJAK RESTORAN

Untuk :
1. BKD Kab. Kapuas Hulu
2. Bendahara Penerimaan
3. Wajib Pajak
NO :
diisi oleh BKD

NPWPD/NOPD :
NAMA WP/OP :
ALAMAT :

Kepada, Yti :
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu
di
Putussibau

PERHATIAN

- Harap diisi lengkap dalam rangkap 3 (tiga)
- Sertakan lampiran laporan rekapitulasi omzet sesuai masa pajak yang dilaporkan.
- Setelah diisi dan ditanda tangani lengkap dengan Laporan Omzet, harap diserahkan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- SPTPD yang tidak disampaikan dalam jangka waktu tersebut dapat dilakukan Penetapan Pajak secara Jabatan

Masa Pajak											
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang berkenaan

TAHUN			

diisi tahun terutangnya pajak

A. KLASIFIKASI USAHA :
1. Restoran
2. Rumah Makan
3. Warung Makan
4. Kantin
5. Cafe
6. Warung Kopi
7. Katering

B. PERHITUNGAN PAJAK YANG DILAPORKAN

Masa Pajak	:	Tanggal s.d Tanggal
Dasar Pengenaan Pajak/Omzet (DPP)	:	Rp.
Tarif Pajak	: %
Pajak Terutang (DPP X Tarif Pajak)	:	Rp.
Sanksi Administrasi (2% x Bulan X Pajak Terutang)	:	Rp.
Diisi oleh Badan Keuangan Daerah apabila lewat jatuh tempo pembayaran		
Jumlah Pajak yang dibayarkan		Rp.

C. DATA PENDUKUNG

1. Laporan Omzet
2. Bonbill yang diporporasi
3. Cash Register
4. Laporan Lainnya
No. S.d

D. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

Wajib Pajak Daerah

(.....)

DITERIMA OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan pajak :
1. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat)
2. Self Assesment (menghitung dan menetapkan sendiri)

Tanggal,
Petugas Penerima

(.....)

NIP.

SPTPD ini bukan merupakan izin

LAPORAN PENERIMAAN RESTORAN / RUMAH MAKAN / WARUNG MAKAN / KANTIN /
KATERING / CAFE / WARUNG KOPI

Nama Wajib Pajak/Objek Pajak :
NPWD/NOPD :
Masa Pajak :
Tahun :

No.	Hari	Tanggal	Penggunaan Bon Bill			Jumlah Omzet (Rp.)	Pajak Restoran (10%)	Ket.
			No Seri :	s.d	No Seri :			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
Jumlah						Rp.	Rp.	

Keterangan :

*Centang salah satu

- ☐ 1. Lampiran Bon Bill Penjualan setiap hari
- ☐ 2. Lampiran Pemakaian Struck Cash Register

.....
Dibuat Oleh :
Pengelola / Penyelenggara Restoran

(.....)

DAFTAR NAMA OPD KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2023

NO	NAMA OPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
11	DINAS PERHUBUNGAN
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
13	DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
17	DINAS PERIKANAN
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
19	SEKRETARIAT DAERAH
20	SEKRETARIAT DPRD
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
25	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

26	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU
27	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
29	KECAMATAN BIKA
30	KECAMATAN KALIS
31	KECAMATAN EMBALOH HILIR
32	KECAMATAN EMBALOH HULU
33	KECAMATAN BUNUT HILIR
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG
35	KECAMATAN BUNUT HULU
36	KECAMATAN MENTEBAH
37	KECAMATAN JONGKONG
38	KECAMATAN PENGKADAN
39	KECAMATAN HULU GURUNG
40	KECAMATAN SELIMBAU
41	KECAMATAN BADAU
42	KECAMATAN BATANG LUPAR
43	KECAMATAN EMPANANG
44	KECAMATAN PURING KENCANA
45	KECAMATAN SEMITAU
46	KECAMATAN SUHAID
47	KECAMATAN SEBERUANG
48	KECAMATAN SILAT HILIR
49	KECAMATAN SILAT HULU
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK